

## **KERJASAMA IJEPA (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) DALAM PERSPEKTIF STRUKTURALISME**

**Eko Muji Santoso<sup>1</sup>**

**Abstract:** *The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is an economic cooperation between the governments of Indonesia and Japan. In principle, this cooperation is mutual market openness in Japan and in Indonesia as well as increasing Indonesia's capacity with Japanese assistance. The results of this research using the world system theory Immanuel Wallerstein. This theory is used to answer the reasons for Indonesia's loss from the IJEPA Cooperation (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). IJEPA policy is not profitable for the Indonesian government if Indonesia does not revise and optimize IJEPA instruments such as MIDEK. If IJEPA and MIDEK are run seriously, hopefully Indonesia can be more fortunate and can optimize the transfer of science and technology from Japan so that it can overcome the economic problems that exist in Indonesia.*

**Keywords:** *Indonesia, Japan, Structuralism, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*

### **Pendahuluan**

IJEPA (*Indonesian-Japan Economic Partnersip agreement*) merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA (*Economic Partnership Agreement*). EPA pada prinsipnya ialah keterbukaan pasar di Jepang dan di Indonesia secara timbal balik serta peningkatan kapasitas Indonesia dengan bantuan pihak Jepang, IJEPA ditandatangani kepala negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta. IJEPA dilandasi oleh tiga pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi investasi/perdagangan dan kerjasama.<sup>2</sup> Dalam IJEPA kesepakatan untuk membuka akses pasar lebih besar untuk produk jadi Jepang masuk ke pasar Indonesia begitu juga sebaliknya dengan produk Indonesia masuk ke Jepang (Setiawan, 2008).

Tujuan IJEPA adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan, jasa, investasi, fasilitas dan kerja sama ekonomi, Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA hanya sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang terhadap komoditi Indonesia yang akan di ekspor ke Jepang (*proper balance*) (JETRO, 2018).

*Economic Partnership Agreement* (EPA) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan. EPA dan FTA (*Free Trade Area*) memiliki kesamaan dalam hal penurunan atau penghapusan tarif, namun cakupan dalam EPA tidak hanya mengenai penurunan atau penghapusan tarif melainkan mencakup berbagai bidang lain seperti memfasilitasi Bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, hak kekayaan Intelektual (HKI) serta aturan kebijaksanaan persaingan.

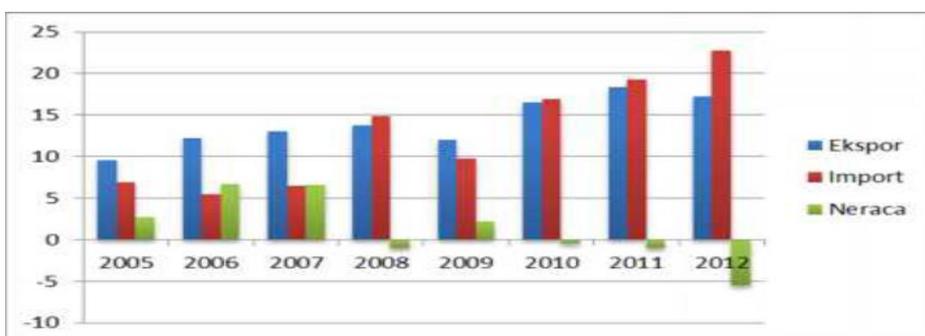
---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : doreskobra@gmail.com

Dengan melakukan kerjasama dalam kerangka EPA, maka komoditi Jepang dan Indonesia dapat memperoleh tarif lebih murah satu sama lain. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia telah menetapkan prinsip *Most Favored Nation* (MFN) sehingga perlakuan suatu negara terhadap semua negara di dunia harus sama, namun jika dua negara menyepakati EPA maka negara tersebut dapat menurunkan tarif lebih rendah dibandingkan dari pada tarif MFN. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat dengan melakukan EPA (JETRO, 2018).

IJEPA telah menyebabkan Indonesia memiliki eskalasi besar pada impor dari Jepang, sementara produk-produk dari Indonesia masih tidak bisa bersaing di pasar domestik Jepang sehingga ekspor Indonesia tidak dapat memiliki nilai yang sama dineraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan sektor non-migas antara Indonesia dengan Jepang. Data pada tahun 2005-2012 yang mempresentasikan sebelum adanya IJEPA, berturut-turut ialah sebagai berikut.

**Tabel 1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Jepang sektor Migas dan Non-Migas periode 2007-2012**



Sumber: Firdaus.2014

Pada tabel 1 menjelaskan kesimpulan bahwa ekspor Indonesia ke Jepang lebih tinggi dari sebelum dilaksanakannya IJEPA terbukti pada tahun 2005-2007 sedangkan tahun 2008 dan 2010-2012 Indonesia mengalami penurunan neraca perdagangan pada sektor non-migas. Telah diketahui bahwa kebijakan IJEPA tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia, akan tetapi kerjasama IJEPA masih terus dilaksanakan (Firdaus,2018).

Penulis mencoba melihat kesepakatan kerjasama IJEPA melalui perspektif strukturalisme. Dalam perspektif strukturalisme Immanuel Wallerstein menjelaskan bagaimana proses dalam hubungan saling ketergantungan dalam kerjasama ekonomi itu terus bertahan sehingga menciptakan sistem dunia yang bersifat hirarki dan eksploitatif, dalam hal ini paham strukturalisme berpendapat bahwa hubungan ekonomi global dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan sebuah negara atau kelas tertentu, sehingga menghasilkan sebuah sistem dunia yang pada dasarnya tidak adil.

## Kerangka Teori

### *World System Theory (Immanuel Wallerstein)*

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik dimana ada dua atau lebih negara interdependensi yang saling bekerjasama untuk

memenuhi kebutuhan seperti *food, fuel, and protection*. Juga, terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya.

Teori sistem dunia menyatakan bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu *division of labor* tunggal yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Secara hierarkis wilayah dunia dibagi menjadi tiga bagian, yakni: Wilayah “pusat” (*center*) yang maju dan dominan; “semi pinggiran” (*semi periphery*) yang setengah maju, dan “pinggiran” (*periphery*) yang tergantung dan terbelakang. Keberadaan dan status masing-masing wilayah menggambarkan derajat penetrasi kekuatan kapitalis. Secara ekonomi maupun politik, wilayah “pusat” yang metropolis menciptakan keterbelakangan di wilayah-wilayah “pinggiran”. Hubungan antara “pusat” dan “pinggiran” bercorak eksploitatif, yang ditandai adanya aliran surplus ke negara-negara “pusat”. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ketimpangan di negara-negara pinggiran. Negara-negara pinggiran terjebak dalam siklus atau pusaran keterbelakangan. Adanya hierarki tersebut menunjukkan wujudnya tingkat kemampuan masing-masing negara yang berbeda-beda.

Dalam pandangan Wallerstein, wilayah pusat adalah negara-negara atau kota-kota utama dunia yang selama ini menjadi pusat-pusat bisnis, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional, yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis. Kota-kota metropolis itu seperti: Washington, New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), Berlin (Jerman), Tokyo (Jepang), Brussel (Belgia), Amsterdam (Belanda) serta negara-negara Eropa Barat maju lainnya. Wilayah-wilayah ini menjadi penyangga sekaligus simbol tegaknya sistem kapitalis global, yang mendominasi sebagian besar aktivitas perdagangan dunia. Negara-negara pusat ini merupakan aktor utama yang menggerakkan perubahan-perubahan dunia, termasuk menentukan nasib negara-negara yang sedang membangun.

Penekanan pada teori ini adalah, negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. negara pusat bisa saja menjadi negara semi pinggiran, negara semi pinggiran bisa menjadi negara pusat atau negara pinggiran, dan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Hal ini terbukti pada Perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa. Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:

1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi primere mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara berkembang.
2. Dengan MNC (Multi National Corporation) akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi negara setengah pinggiran.
3. Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh negara Peru

dan Chile yang berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing.

Pandangan Wallerstein sistem dunia berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (*the cyclical rhythms*), yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Perputaran inilah yang secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi sentral semi pinggiran, bahkan terlempar menjadi negara pinggiran (Wallerstein, 2004).

### Metode Penelitian

Data yang terkumpul akan digabungkan dan dianalisis demi mendukung permasalahan yang diteliti dan tentunya data-data tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pembentukan IJEPA

*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) merupakan sebuah perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perekonomian yang lebih kompleks daripada *Free Trade Area* (FTA). IJEPA sendiri merupakan perjanjian sejenis keempat oleh Jepang yang merupakan perwujudan dari Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang sebagai perwujudan CEPAs (*Comprehensive Economic Partnership Agreements*) dengan negara-negara yang tergabung dalam *Association South east Asia Nation* (ASEAN) (mofa.go.jp, 2018).

IJEPA sendiri berawal dari proposal pembentukan FTA (*Free Trade Area*) secara bilateral yang coba ditawarkan oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati ketika Presiden berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 juni 2003 (bilaterals.org, 2004) Pada pertemuan APEC di *Pnom Penh* Kamboja tanggal 20-21 November 2004, SBY secara resmi menyampaikan kepada PM Koizumi mengenai pentingnya EPA sebagai alat untuk mempromosikan hubungan perekonomian yang lebih dekat diantara kedua negara. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2004, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Soichi Nakagawa menemui Menteri Perekonomian Indonesia Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan EPA tersebut (bilaterals.org, 2004).

Dan pada akhirnya laporan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari kedua belah pihak diserahkan kepada pemimpin negara masing-masing. Kedua pemimpin yang tidak lain adalah Perdana Menteri Juichiro Koizumi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat puas dengan laporan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada tanggal 2 Juni 2005 dilaksanakan pertemuan antara pemimpin kedua negara dan mendiskusikan tentang peluang dari kerjasama IJEPA berdasarkan laporan dari para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang peluang kerjasama EPA antara kedua negara. Pada akhirnya kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk segera memasuki

tahap negosiasi untuk melaksanakan kerjasama IJEPA, dan kemudian IJEPA resmi dilaksanakan di tahun 2007 ([antaranews.com](http://antaranews.com), 2018).

## 2. Tiga Pilar Utama Kerangka IJEPA

Dalam perjanjian IJEPA, kerja sama yang disepakati ditopang dengan tiga pilar utama yaitu; pengembangan sumber daya manusia (*capacity building/cooperation*), liberalisasi (*liberalization*) dan fasilitasi perdagangan barang, jasa dan investasi (*facilitation*). Liberalisasi, yaitu menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Sejak berlakunya IJEPA, Jepang memberikan konsesi khusus kepada Indonesia berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi, yaitu fast-track, normal track dan pengecualian. Dalam pengecualian tersebut, merupakan barang-barang selain industri dengan memasang *emergency and safeguard measures* untuk mencegah dampak negatifnya produk industri domestik dari Indonesia (Setiawan, 2008).

Kedua, *Facilitation*, yaitu pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja bea cukai, penanganan di pelabuhan terkait jasa perdagangan dan upaya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor Jepang (Setiawan, 2008).

Ketiga, *Cooperation*, yaitu kerjasama dimana Jepang berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri melalui pembangunan *capacity building* dalam pengembangan industri di Indonesia yang disebut *Manufacturing Industrial Development Center* (MINDEC). Untuk meningkatkan kapasitas industri Indonesia, Jepang membantu dalam kegiatan *basic study; trainee and trainer* dan *technical assistance*. Dalam IJEPA terdapat skema khusus yaitu *User Specific DutyFree Scheme* (USDFFS) yang diberikan dari Indonesia ke Jepang dengan tariff 0% artinya pembebasan bea masuk hanya untuk produk-produk pembangunan dalam sektor industri dengan imbalan Jepang akan memberikan fasilitas MINDEC terhadap Indonesia untuk pembangunan industry (Setiawan, 2008).

## 3. Tujuan IJEPA

IJEPA juga dicantumkan sebagai rencana pelaksanaan pembentukan Pusat Pengembangan Industri Manufaktur, yang bertujuan untuk mengembangkan industri, antara lain pengerjaan logam (metal working), energy, tekstil, elektronik, dan otomotif. Dengan dibentuknya pusat pengembangan industri manufaktur untuk Indonesia, maka akan sangat membantu para produsen di Indonesia dalam meningkatkan kualitas produknya agar mampu melewati hambatan non- tariff yang berlaku di Jepang. Disisi lain, menurut menteri perdagangan Mari Eka Pengestu, dengan adanya IJEPA akan lebih meningkatkan efisiensi produksi, peningkatan investasi, dan kemudahan bagi pengusaha dan konsumen. ([economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), 2008)

## 4. Mekanisme Kerjasama IJEPA

Kerjasama IJEPA ini yang pada awalnya diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi di kedua belah pihak dengan saling membantu antara satu sama lain. Sudah ditetapkan dalam komitmen di awal perjanjian bahwa Jepang bersedia untuk mengurangi bea masuk dan membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas produk ekspornya, sehingga produk-produk dari Indonesia mudah melewati hambatan non-tariff. Tetapi Setelah diterapkannya IJEPA ada beberapa kerugian yang justru ditanggung oleh Indonesia di beberapa sektor. Pertama-tama kerugian yang harus diderita oleh Indonesia adalah kerugian yang diderita di sektor penerimaan negara dari pajak, khususnya dari pendapatan bea cukai ([id.shvoong.com](http://id.shvoong.com), 2018).

Kerugian yang harus diterima tidak hanya berasal dari penerimaan pajak semata, akan tetapi kerugian yang dihadapi juga terdapat dari ekspor non-migas dari Indonesia. Akibat dijalankannya kesepakatan IJEPA berakibat pada Indonesia yang memiliki eskalasi besar pada impor dari Jepang, sementara produk-produk dari Indonesia masih tidak bisa bersaing di pasar domestik Jepang sehingga ekspor Indonesia tidak dapat memiliki nilai yang sama dineraca perdagangan ([unair.ac.id](http://unair.ac.id), 2014)

### **Strukturalisme (World System Theory)**

#### **a.Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang.**

Sebagai misal negara semi pinggiran dan pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.

Jika melihat poin pertama ini, Indonesia dapat memanfaatkan skema MIDEK dalam kerjasama IJEPA, dimana seharusnya Jepang harus lebih diupayakan untuk lebih fokus mentransfer pengetahuan seperti dalam perjanjian awal dalam MIDEK, sehingga dengan mentransfer ilmu pengetahuan baru kepada Indonesia agar dapat menciptakan komoditi baru dalam bidang elektronik dan otomotif, sehingga dapat menghasilkan produk-produk industri alternatif agar dapat mengurangi impor komoditi dari Jepang.

#### **b.Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang.**

Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara semi pinggiran dan pinggiran dapat meningkat menjadi negara pusat atau semi pinggiran.

Dalam poin kedua teori Wallerstein, *Coorporation* merupakan salah satu pilar dalam kerangka kerjasama IJEPA, pilar ini seharusnya dapat menjadi instrumen kenaikan kelas melalui jalur undangan seperti yang di katakana Wallerstein, dimana pilar ini berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri melalui pembangunan *capacity building* dalam pengembangan industri di Indonesia yang disebut *Manufacturing Industrial Development Center* (MIDEK).

Untuk meningkatkan kapasitas industri Indonesia, Jepang membantu dalam kegiatan *basic study; trainee and trainer* dan *technical assistance*. Dalam IJEPA terdapat skema khusus yaitu *User Specific DutyFree Scheme (USDFS)* yang diberikan dari Indonesia ke Jepang dengan tariff 0% artinya pembebasan bea masuk hanya untuk produk-produk pembangunan dalam sektor industri dengan imbalan Jepang akan memberikan fasilitas MIDEK terhadap Indonesia untuk pembangunan industri.

#### **c.Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya.**

Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing.<sup>3</sup> Di poin ketiga ini dapat dilakukan apabila kerjasama IJEPA sudah sangat terealisasi dan telah menciptakan kemapanan

dalam industri domestik di Indonesia, sehingga dapat melepaskan diri dari eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang.

Dalam Pandangan Wallerstein sistem dunia berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (*the cyclical rhythms*), yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Perputaran inilah yang secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi sentral, semi pinggiran, bahkan terlempar menjadi pinggiran.

Setelah melihat penjelasan asumsi pokok Strukturalisme dari Immanuel Wallerstein yaitu bagaimana suatu negara semi pinggiran dan pinggiran bisa dapat berubah dan dapat menuju ke arah lebih baik dengan tiga strateginya yaitu: Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang, Kenaikan kelas terjadi melalui undangan dan Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Maka, hasil dari analisis yang dilakukan penulis terkait Kerjasama Ijepa Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dapat dilihat bahwa Strukturalisme mampu memberikan kritikan terhadap keberadaan Kerjasama IJEPA dimana asumsi-asumsi dari Strukturalisme masih relevan untuk memberikan sebuah perspektif yang cenderung skeptis terhadap keberlangsungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang. (wallerstein.2004)

### **Kesimpulan**

Telah diketahui bahwa kebijakan IJEPA tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia terutama pada bidang ekspor-impor komoditi non migas, indonesia selalu mengalami defisit perdagangan pada sektor non migas terutama pada priode awal penerapan IJEPA pada tahun 2008 sampai 2012.

Indonesia harus merevisi dan mengoptimalkan instrumen-instrumen seperti MINDEC dalam kerjasama IJEPA, agar lebih mendapatkan mamfaat nyata dari kerjasama IJEPA, dengan adanya IJEPA, merujuk pada pandangan strukturalisme Immanuel Wallerstein bahwa kerjasama ekonomi masih memiliki peluang bagi negara semi pinggiran, dan negara pinggiran untuk menjadi negara pusat lewat fenomena *the cyclical rhythms*.

### **Daftar Pustaka**

- Wallerstein, Immanuel.2004. "*World-systems analysis: an introduction*", Duke University Press, Durham and London.
- Sigit Setiawan, 2018, Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia, tersedia di [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pkrb\\_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf) diakses, 12 januari 2018
- Moffa "Join statement on Japan-Indonesia summit meeting" dalam <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/pv0306/summit.pdf>, diakses
- Rendi, 2014 "Pembentukan Ijepa" dalam [www.bilaterals.org/?new-indonesian-japanese-deal-to-be](http://www.bilaterals.org/?new-indonesian-japanese-deal-to-be)
- Bob Widyahartono, 2010 dalam "*IJEPA Perlu Langkah Implementasi*" <http://www.antarane.ws.com/berita/1271008549/ijepa-perlu-langkah-implementasi>
- Nuria, Okezone 2008, "Implentasi Ijepa" dalam

<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/19/122368/1-juli-implementasi-ijepa>

R.Dicky Johar Pribadi 2015 “Perspektif Strukturalisme” dalam

[http://dickyjp96fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-135427SOH201%20Teori%20Hubungan%20InternasionalPerspektif%20Strukturalisme.htm,l](http://dickyjp96fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-135427SOH201%20Teori%20Hubungan%20InternasionalPerspektif%20Strukturalisme.htm,l)

Rizky Wendi Firdaus. 2014 “Jurnal,Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap Defisitnya Neraca Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Jepang 2008-2012”, Vol. 3 - No. 2 / 2014-07 TOC : 9, and page : 597 – 613.